

Dari Dana Desa ke Desa Berdaya: Menguji Peran Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi

Ilham Thoriq Arif ¹, Pandi Afandi ², Ambar Istiyani ^{*3}

^{1, 2, 3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA, Salatiga, Indonesia

* 2021105022@student.stieama.ac.id¹, pandi.afandi@stieama.ac.id², ambar@stieama.ac.id³

Abstract

Urgensi penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa yang akuntabel, transparan, dan partisipatif mampu mewujudkan desa yang lebih berdaya dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Amongrogo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Sampel penelitian terdiri atas 100 responden yang dipilih berdasarkan kriteria berusia minimal 17 tahun dan memiliki hak pilih. Analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat, sedangkan transparansi berpengaruh negatif terhadap pemberdayaan masyarakat. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dengan nilai koefisien determinasi sebesar 40,4%. Sisanya sebesar 59,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain, seperti faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan desa, serta memperluas cakupan sampel.

Keywords: *Akuntabilitas, Partisipasi, Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Dana Desa, Transparansi.*

Pendahuluan

Desa merupakan entitas pemerintahan yang telah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia dan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat di tingkat local (Yusuf & Khoirunurrofik, 2022). Sebagian besar masyarakat tinggal di desa dan berbagai persoalan lebih efektif diselesaikan di tingkat ini, sehingga kondisi desa menjadi indikator kesejahteraan suatu bangsa (Ro'fah et al., 2022). Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat desa menjadi kunci utama dalam meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi lokal guna mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Rachman et al., 2022). Dalam kerangka otonomi daerah, desa diberikan kewenangan luas untuk mengelola sumber daya secara mandiri, namun tetap memerlukan pengawasan yang kuat agar terhindar dari penyimpangan (Lewis & Mansuri, 2022).

Pembangunan desa harus didasarkan pada kebutuhan, aspirasi, dan prioritas masyarakat setempat agar program yang dilaksanakan tepat sasaran, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal (Kusumasari et al., 2023). Salah satu instrumen penting dalam pembangunan desa adalah Dana Desa yang bersumber dari APBN dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Julita & Abdullah, 2020). Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

<https://doi.org/10.30605/jss.6.3.2026.1326>

Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan desa, serta mendorong masyarakat berperan sebagai subjek pembangunan yang aktif, mandiri, dan berdaya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama (Dharmakarja et al., 2020; Jusrianto et al., 2022). Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan proses sistematis untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi (Pakpahan, 2018; Rachman et al., 2022; Sarjiyanto et al., 2024). Pemberdayaan juga mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari konsumtif menjadi produktif (Yassa & Bumbungan, 2021).

Pengelolaan Dana Desa harus berlandaskan prinsip *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat (Bela & Utama, 2019; Safitri et al., 2023). Akuntabilitas merupakan bentuk bagaimana pemerintah desa mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik secara efisien dan sesuai aturan. Dengan akuntabilitas yang baik, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat dan partisipasi mereka dalam pembangunan semakin aktif (Rosidah et al., 2023). Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik (Safitri et al., 2023). Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa, sehingga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (Putri et al., 2021). Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat lebih memahami hak, kewajiban, dan perannya dalam proses pembangunan sehingga mendorong partisipasi aktif, kepercayaan publik, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah desa.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan warga dalam proses identifikasi masalah, pengambilan keputusan, implementasi, sampai dengan evaluasi program pembangunan (Latif et al., 2019). Partisipasi yang tinggi menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat karena mendorong koordinasi antara masyarakat dan pemerintah desa (Atmojo et al., 2017). Sebaliknya, rendahnya partisipasi dapat menghambat keberhasilan program pemberdayaan. Penelitian sebelumnya terkait pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pemberdayaan masyarakat menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menemukan pengaruh positif dan signifikan (Putra & Larasdiputra, 2023; Sakdiyah et al., 2023). Sementara penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak signifikan atau berbeda (Marta et al., 2021; Putri et al., 2021). Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*).

Kebaruan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berbeda, yaitu Desa Amongrogo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, yang hingga saat ini belum pernah diteliti dengan mengkaji secara bersamaan pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat. Perbedaan lokasi penelitian memberikan konteks empiris yang baru karena setiap desa memiliki karakteristik tata kelola, tingkat partisipasi masyarakat, serta kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda, sehingga berpotensi menghasilkan temuan yang tidak sama dengan penelitian terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengelolaan dana desa dan pemberdayaan masyarakat sekaligus memberikan bukti empiris yang lebih spesifik sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pengelolaan dana desa yang efektif sesuai dengan karakteristik Desa Amongrogo.

Desa Amongrogo merupakan desa agraris dengan mayoritas penduduk sebagai petani dan dikenal sebagai sentra produksi emping mlinjo. Namun, berdasarkan pra-survei, masih terdapat berbagai permasalahan seperti rendahnya pemberdayaan pemuda, kurangnya

partisipasi dalam musyawarah desa, serta keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa belum optimal. Penelitian ini menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Amongrogo secara parsial dan simultan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola Dana Desa serta kontribusi teoritis sebagai referensi dalam kajian *good governance* dan pemberdayaan masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dengan tipe *explanatory research*, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan serta pengaruh antar variabel (Sugiyono, 2017). Fokus penelitian adalah menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat sebagai variabel independen terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai variabel dependen. Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat Desa Amongrogo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, dengan jumlah 2.780 penduduk (tahun 2020). Mengingat besarnya populasi, digunakan teknik sampling. Sampel ditentukan dengan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 97 responden dan dibulatkan menjadi 100 orang responden. Penelitian ini mengambil teknik pengambilan *purposive sampling*, dengan kriteria masyarakat Desa Amongrogo yang berusia minimal 17 tahun atau telah memiliki hak pilih.

Definisi konsep digunakan untuk memudahkan operasionalisasi variabel, yaitu: 1). Pemberdayaan masyarakat: upaya mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri dan sejahtera dengan pengembangan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya. 2). Akuntabilitas: bentuk pertanggungjawaban pihak yang diberi amanah kepada stakeholders atas pelaksanaan tugas (Sugiarto, 2020). 3). Transparansi: keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik (Sugiarto, 2020). 4). Partisipasi masyarakat: masyarakat dapat terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan. Variabel penelitian diukur menggunakan indikator sebagai berikut: 1). Pemberdayaan masyarakat: kemampuan, kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab. 2). Akuntabilitas: pencapaian tujuan, keterlibatan pemerintah desa, pengawasan, dan laporan pertanggungjawaban (Sugiarto, 2020). 3). Transparansi: akses dokumen, kejelasan informasi, keterbukaan proses, dan regulasi (Sugiarto, 2020). 4). Partisipasi masyarakat: keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil (Ardianti, 2019).

Data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner dan observasi lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert (1–4), dari “sangat tidak setuju” hingga “sangat setuju”. Kuesioner disebarkan secara langsung kepada responden di lokasi penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial menggunakan SPSS 22.0. Tahapan analisis meliputi: 1). Uji validitas, menggunakan korelasi Pearson Product Moment untuk mengukur ketepatan instrument (Sugiyono, 2017). Item dinyatakan valid apabila $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ pada $\alpha = 0,05$. 2). Uji Reliabilitas, dengan menggunakan koefisien Alpha Cronbach guna mengukur konsistensi instrumen. Instrumen dinyatakan reliabel jika $\alpha > 0,70$ (Ghozali, 2018). 3). Regresi Linear Berganda, digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan model:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Uji Parsial (Uji t), digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hipotesis diterima jika nilai signifikansi $< 0,05$. 2). Uji Simultan (Uji F), digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika nilai signifikansi $< 0,05$. 3). Koefisien Determinasi (Adjusted R^2), digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai mendekati 1 menunjukkan kemampuan penjelasan yang tinggi.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Objek dan Data Penelitian

Desa Amongrogo terletak di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, dan merupakan salah satu dari 17 desa di wilayah tersebut. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 199 ha, berada di dataran rendah dengan ketinggian $\pm 5,8$ mdpl, serta dilalui aliran sungai Kali Arus. Secara geografis, desa ini berbatasan dengan Desa Ngaliyan (utara), Desa Dlisen (selatan), Desa Rejosari Barat (timur), dan Desa Medono (barat). Desa Amongrogo merupakan desa agraris berpenduduk 2.778 jiwa yang tersebar di tujuh dusun dan dipimpin oleh kepala desa beserta perangkat desa sesuai struktur organisasi.

Data penelitian dikumpulkan melalui metode survei menggunakan kuesioner yang disebar secara langsung kepada 100 responden masyarakat Desa Amongrogo pada periode 20–25 Juni 2025. Karakteristik responden menunjukkan bahwa mayoritas berjenis kelamin laki-laki sebanyak 64%, sedangkan perempuan berjumlah 36%. Berdasarkan kelompok usia, responden didominasi oleh usia produktif 17–30 tahun sebesar 43%, diikuti usia 30–40 tahun sebesar 22%, yang mencerminkan tingginya keterlibatan masyarakat usia produktif dalam penelitian. Responden berasal dari seluruh dusun di Desa Amongrogo, dengan jumlah terbesar berasal dari Dukuh Amongrogo sebesar 29%, sehingga mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara representatif. Dari sisi tingkat pendidikan, mayoritas responden merupakan lulusan SMA/SMK (53%), disusul perguruan tinggi (20%), SMP (18%), dan SD (9%). Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki latar belakang demografis yang beragam sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai persepsi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian positif terhadap seluruh variabel penelitian. Pada variabel akuntabilitas, 59,75% responden menyatakan setuju dan 24,5% sangat setuju, menunjukkan pengelolaan dana desa dinilai telah akuntabel. Transparansi juga memperoleh persepsi positif dengan 56% responden setuju dan 29,75% sangat setuju terhadap keterbukaan informasi. Selanjutnya, partisipasi masyarakat tergolong tinggi, tercermin dari 62,75% responden setuju dan 26,75% sangat setuju atas keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat dinilai baik, dengan 50,75% responden setuju dan 29,5% sangat setuju, meskipun sebagian kecil responden belum sepenuhnya merasakan manfaatnya.

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan guna memastikan bahwa setiap item pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti (Utami, 2023). Dengan jumlah responden 100 orang, diperoleh nilai r_{tabel} sebesar 0,1966 ($\alpha = 0,05$).

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Kuesioner Penelitian

No	Variabel	R hitung	R tabel	Keterangan
1	Pemberdayaan Masyarakat (Y)	0,815	0,1966	Valid
		0,816	0,1966	Valid
		0,812	0,1966	Valid
		0,801	0,1966	Valid
2	Akuntabilitas (X1)	0,814	0,1966	Valid
		0,836	0,1966	Valid
		0,819	0,1966	Valid
		0,822	0,1966	Valid
3	Transparansi (X2)	0,844	0,1966	Valid
		0,856	0,1966	Valid
		0,780	0,1966	Valid
		0,805	0,1966	Valid
4	Partisipasi Masyarakat (X3)	0,670	0,1966	Valid
		0,810	0,1966	Valid
		0,821	0,1966	Valid
		0,779	0,1966	Valid

Hasil pengujian sebagaimana digambar pada Tabel 1, menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel pemberdayaan masyarakat (Y), akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan partisipasi masyarakat (X3) memiliki nilai r hitung lebih besar dari rtabel. Dengan demikian, seluruh butir pernyataan dinyatakan valid karena memenuhi kriteria pengujian validitas yang telah ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa instrumen kuesioner mampu mengukur setiap variabel penelitian secara tepat, sehingga layak digunakan sebagai alat pengumpulan data dan mendukung pelaksanaan analisis statistik pada tahap selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi dan kestabilan instrumen penelitian dalam menghasilkan data yang andal, sehingga dapat dipercaya untuk mengukur variabel penelitian secara konsisten pada setiap pengukuran.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian

No	Variabel	Cronbach Alpha	Alpha Pembanding	Keterangan
1	Pemberdayaan Masyarakat (Y)	0,825	0,70	Reliabel
2	Akuntabilitas (X1)	0,833	0,70	Reliabel
3	Transparansi (X2)	0,840	0,70	Reliabel
4	Partisipasi Masyarakat (X3)	0,776	0,70	Reliabel

Hasil pengujian sebagaimana diilustrasikan dalam Tabel 2. menunjukkan bahwa seluruh variabel mempunyai nilai Cronbach Alpha di atas 0,70, yaitu pemberdayaan masyarakat (0,825), akuntabilitas (0,833), transparansi (0,840), dan partisipasi masyarakat (0,776). Dengan demikian, semua variabel dinyatakan reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan memiliki tingkat konsistensi yang baik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan partisipasi masyarakat (X3) terhadap pemberdayaan masyarakat (Y). Hasil analisis menghasilkan persamaan:

$$Y = 2,003 + 0,551X1 - 0,127X2 + 0,405X3.$$

Tabel 3. Regresi Linier Berganda dan Uji t

Coefficients ^a					
		Unstandardized	Standardized	t	Sig.
		Coefficients	Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	2.003	1.271		1.576 .118
	Akuntabilitas	.551	.159	.479	3.474 .001
	Transparansi	-.127	.178	-.114	-.714 .477
	Partisipasi Masyarakat	.405	.161	.326	2.515 .014

a. Dependent Variable: pemberdayaan masyarakat

a. Dependent Variable: pemberdayaan masyarakat

Nilai konstanta sebesar 2,003 menunjukkan bahwa tanpa pengaruh variabel independen, nilai pemberdayaan masyarakat berada pada angka tersebut. Variabel akuntabilitas (X1) memiliki koefisien positif sebesar 0,551, yang berarti peningkatan akuntabilitas akan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Variabel transparansi (X2) memiliki koefisien negatif sebesar -0,127, yang menunjukkan bahwa peningkatan transparansi justru diikuti penurunan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya literasi masyarakat dalam memahami informasi, sehingga transparansi belum mampu mendorong pemberdayaan secara optimal. Sementara itu, partisipasi masyarakat (X3) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,405, yang menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa akan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil penelitian mengindikasikan bahwa akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat, sedangkan transparansi menunjukkan arah pengaruh negatif, meskipun tidak signifikan secara statistik.

Uji Parsial (t)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap pemberdayaan masyarakat. Dengan jumlah sampel 100 responden, diperoleh nilai ttabel sebesar 1,98498 ($\alpha = 0,05$; $df = 96$). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa akuntabilitas (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $3,474 > t_{tabel}$. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, semakin tinggi tingkat pemberdayaan masyarakat. Temuan tersebut didukung oleh persepsi responden yang menilai pemerintah desa telah mengelola dana desa secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Sugiarto (2020).

Sementara itu, transparansi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar $0,477 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $-0,714 < t_{tabel}$. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi belum menjadi faktor utama yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat, yang diduga disebabkan oleh fokus program desa yang masih lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur dibandingkan kegiatan pemberdayaan. Temuan ini konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya, meskipun berbeda dengan hasil penelitian Putri et al. (2021).

Selanjutnya, partisipasi masyarakat (X3) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dengan nilai signifikansi sebesar $0,014 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $2,515 > t_{tabel}$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa, maka semakin meningkat pula tingkat pemberdayaan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat

merupakan faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian secara parsial, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan, sedangkan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Uji Simultan (F)

Uji simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama terhadap pemberdayaan masyarakat. Dengan jumlah sampel 100 responden, diperoleh nilai Ftabel sebesar 3,091.

Tabel 4. Uji Simultan (F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	250.439	3	83.480	23.378	.000 ^b
	Residual	342.801	96	3.571		
	Total	593.240	99			

a. Dependent Variable: pemberdayaan masyarakat

b. Predictors: (Constant), partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi

Hasil pengujian menunjukkan nilai Fhitung sebesar 23,378 > Ftabel (3,091) dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat diterima.

Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.650 ^a	.422	.404	1.88967

a. Predictors: (Constant), partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi

Hasil analisis menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,404. Hal ini berarti bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat mampu menjelaskan 40,4% variasi pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, 59,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa secara regresi linier berganda, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa memiliki hubungan positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Artinya, semakin baik akuntabilitas dan semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka pemberdayaan masyarakat akan meningkat. Sebaliknya, transparansi menunjukkan hubungan negatif terhadap pemberdayaan masyarakat. Secara parsial, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terbukti berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa.

Transparansi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, sehingga belum menjadi faktor penentu dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada konteks penelitian ini. Namun demikian, ketika diuji secara simultan, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama terbukti berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut tetap memiliki peran penting secara kolektif dalam mendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa. Besarnya pengaruh ketiga variabel tersebut ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,404, yang berarti 40,4% variasi pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan oleh model penelitian, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah desa diharapkan terus meningkatkan kualitas akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa melalui kinerja yang jujur, terbuka, dan sesuai dengan peraturan. Transparansi juga perlu diperkuat dengan menyediakan informasi yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Di sisi lain, masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan desa agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan mampu meningkatkan kesejahteraan bersama. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian dengan menambahkan variabel lain yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat. Selain itu, peneliti juga perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada responden sebelum penyebaran kuesioner agar kualitas data yang diperoleh menjadi lebih optimal.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Atmojo, M. E., Fridayani, H., Kasiwi, A. N., & Pratama, M. A. (2017). Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Bangunjiwo. *Aristo*, 5(1), 126–140. <https://doi.org/10.24269/ars.v5i1.423>
- Bela, H. S., & Utama, A. S. (2019). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 4(3). <https://doi.org/10.36982/jpg.v4i3.772>
- Dharmakarja, I. G. M. A., Kusuma, I. G. K. C. B. A., & Putra, C. M. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Desa Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 4(2). <https://doi.org/10.31092/jmkp.v4i2.1021>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (ke-9th ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. In (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 213–221. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15556>
- Jusrianto, J., Nur, H., Parubang, D., & Nila, N. (2022). Realisasi Bantuan Dana Hibah PT Vale (Dana Community Development) Terhadap Masyarakat di Desa Laskap Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. *Journal Social Society*, 2(1), 28–36. <https://doi.org/10.54065/jss.2.1.2022.124>

- Kusumasari, B., Pramusinto, A., & Fadli, M. Z. (2023). Community participation and inclusive rural development: Evidence from village governance in Indonesia. *Sustainability*, 15(8), 6678. <https://doi.org/10.3390/su15086678>
- Lewis, B. D., & Mansuri, G. (2022). Village decentralization, local governance, and rural development in Indonesia. *World Development*, 157, 105934. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105934>
- Pakpahan, R. R. (2018). Akuntabilitas birokrasi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. *Jurnal Academia Praja*, 1(2), 51–76. <https://doi.org/10.36859/jap.v1i02.65>
- Putra, G. S. A., & Larasdiputra, G. D. (2023). The influence of accountability, transparency, participation, and characteristics of Satya on the management of village funds. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 6(1), 20–28. <https://doi.org/10.31940/jasafint.v6i1.20-28>
- Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 258–280. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1543>
- Rachman, D. R. N., Roziqin, A., & Salahudin, S. (2022). Community empowerment based on local potential: A systematic literature review. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 299–316. <https://doi.org/10.30996/dia.v20i01.6472>
- Ro'fah, R., Hanjarwati, A., & Suprihatiningrum, J. (2022). The long road to social inclusion: Participation of vulnerable groups in village development. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 6(2), 161–183. <https://doi.org/10.14421/jpm.2022.062-05>
- Rosidah, I., Gunardi, Priatna Kesumah, & Royke Bahagia Rizka. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi: EMBA*, 2(1), 137–156. <https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110>
- Safitri, A. E., Pramomo, J., & Istiyani, A. (2023). Pengaruh good government governance dan perilaku kepemimpinan kepala desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa: Studi kasus di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. *Jurnal IMAGINE*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.35886/imagine.v3i1.501>
- Sakdiyah, L. R., Rani, U., & Bharata, R. W. (2023). The influence of accountability, transparency, community participation and the village financial system on the effectiveness of village fund management. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 503–514. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.1635>
- Sarjiyanto, S., Mulki, Y. A., & Istiqomah, N. (2024). The impact of typology capital on community empowerment programs: Evidence from rural development in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 25(1), 17–35. <https://doi.org/10.18196/jesp.v25i1.20083>
- Sugiarto, Y. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Margomulyo

Kecamatan Juwana Kabupaten Pati [Universitas Semarang].
<https://eskripsi.usm.ac.id/detail-B21A-1764.html>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis* (M. S. Sofia Yustiyani Suryandari, S.E. (ed.); 3rd ed.). Alfabeta.

Yassa, S., & Bumbungan, B. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Perekonomian Masyarakat. *Journal Social Society*, 1(1).
<https://doi.org/10.54065/jss.1.1.2021.52>

Yusuf, M., & Khoirunurrofik. (2022). The relationship of village funds with village economic development: A village level study in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 493–504.
<https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.493-504>